



**DEMOGRAFI ANGKATAN KERJA DI INDONESIA: TREN,
TANTANGAN, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI**

**WORKFORCE DEMOGRAPHY IN INDONESIA: TRENDS, CHALLENGES
AND IMPLICATIONS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT**

Riwanda¹, Arif Ferdiyan Saputra², Rana Nadia Fitri³, Anas Malik⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email: riwandapratama9188@gmail.com¹, arifferdiyansaputra@gmail.com², rananadia591@gmail.com³,

anasmalik@radenintan.ac.id⁴

Article history :

Received : 24-11-2024

Revised : 26-11-2024

Accepted : 28-11-2024

Published: 30-11-2024

Abstract

The purpose of this study is to examine Indonesia's labor force demographic trends, obstacles encountered, and their effects on economic growth. With more young people joining the workforce, Indonesia has seen significant changes in the demographic makeup of its workforce in recent decades. This youthful workforce has a lot of potential, but there are a number of obstacles to overcome, including gender disparities, educated unemployment, and skills mismatch. This research is of the library or literature research type. Gathering information about a research topic from a variety of sources, including research abstracts, indexes, reviews, journals, and reference books, is known as library research. According to the study's findings, policies that promote training, workforce skill enhancement, and the growth of technology-based industries can raise worker standards and promote sustainable economic growth.

Keywords: Demography, Workforce, Trends, Challenges, Economic Development

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tren demografi tenaga kerja Indonesia, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin banyaknya kaum muda yang memasuki dunia kerja, Indonesia telah melihat perubahan signifikan dalam susunan demografi tenaga kerjanya dalam beberapa dekade terakhir. Tenaga kerja muda ini memiliki banyak potensi, tetapi ada sejumlah kendala yang harus diatasi, termasuk kesenjangan gender, pengangguran terdidik, dan ketidaksesuaian keterampilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau penelitian literatur. Pengumpulan informasi tentang objek penelitian dari berbagai sumber pustaka, termasuk abstrak penelitian, indeks, tinjauan, jurnal, dan buku referensi, dikenal sebagai penelitian pustaka. Temuan studi menunjukkan bahwa kebijakan yang meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pelatihan, dan pertumbuhan industri berbasis teknologi dapat meningkatkan standar pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Demografi, Angkatan Kerja, Tren, Tantangan, Pembangunan Ekonomi



PENDAHULUAN

Demografi tenaga kerja suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Permintaan pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh pergeseran demografi di Indonesia, khususnya peningkatan proporsi penduduk usia kerja. Dengan populasi pemuda yang cukup besar dan beberapa kendala yang dapat membatasi potensi tenaga kerja, Indonesia menghadapi situasi yang unik. Kesenjangan antara keahlian tenaga kerja dan permintaan pasar tenaga kerja merupakan salah satu kendala utama. Oleh karena itu, untuk menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, penting untuk menganalisis demografi tenaga kerja, tren partisipasi, dan kesenjangan keterampilan. Tenaga kerja Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh antara tahun 2018 dan 2023.

Menurut data BPS, jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun 2023 mencapai 140 juta orang, dengan lebih dari separuhnya berusia 20-39 tahun. Persentase penduduk usia kerja terus meningkat, yang mengindikasikan bahwa Indonesia sedang berada dalam fase bonus demografi. Apabila tenaga kerja tersebut dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada, maka potensi pertumbuhan ekonomi akan sangat besar. Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang rendah, meskipun jumlah tenaga kerja terus meningkat. Pada tahun 2023, TPAK Indonesia sekitar 68%, lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang memiliki TPAK di atas 70%.

Pertumbuhan tenaga kerja Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografi, dan kebijakan pemerintah. Jumlah tenaga kerja di Indonesia terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, terutama pada kelompok usia produktif. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran yang menyebabkan populasi penduduk usia muda semakin bertambah. Meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, tidak semua dari mereka mampu memperoleh pekerjaan yang layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau penelitian literatur. Pengumpulan informasi tentang topik penelitian dari berbagai sumber, termasuk abstrak penelitian, indeks, tinjauan, jurnal, dan buku referensi, dikenal sebagai penelitian pustaka. Tinjauan literatur adalah jenis penelitian yang merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis terhadap topik tertentu dengan cara mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, konsep, atau temuan yang ditemukan dalam kumpulan literatur yang berorientasi akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Pertumbuhan Angkatan Kerja di Indonesia

Selain itu, ada tren peningkatan dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang menghitung proporsi penduduk usia kerja yang bekerja. Meskipun demikian, ada banyak variasi regional. Misalnya, karena industri dan sektor ekonomi yang lebih maju terkonsentrasi di kota-kota besar, peluang kerja di sana lebih banyak daripada di daerah pedesaan atau daerah dengan ekonomi yang kurang berkembang. Namun, masih ada kendala signifikan dalam membangun pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kualifikasi angkatan kerja, khususnya bagi lulusan



pendidikan menengah dan pasca-menengah yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan industri.

Pengembangan tenaga kerja yang berkualitas juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Kesenjangan antara tingkat pendidikan yang diperoleh dengan tuntutan pasar tenaga kerja masih terjadi meskipun tingkat partisipasi pendidikan Indonesia terus meningkat. Kurangnya keterampilan praktis menghalangi banyak pekerja muda untuk memasuki dunia kerja, tetapi di beberapa industri, terjadi kekurangan tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan pelatihan harus mampu mengimbangi tuntutan pasar tenaga kerja yang terus berubah, termasuk di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan ekonomi digital. Perluasan tenaga kerja Indonesia juga merupakan hasil dari urbanisasi yang terus meningkat.

Tenaga kerja di kota-kota besar tumbuh sebagai akibat dari banyaknya orang dari daerah pedesaan yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Sektor industri, jasa, dan perdagangan—yang semuanya membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar—tumbuh sebagai akibat dari proses urbanisasi ini. Namun, ada juga kelemahan lain dari urbanisasi, seperti meningkatnya angka pengangguran, kesenjangan upah, dan maraknya pekerjaan informal di kota-kota besar. Inisiatif pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan meliputi program penciptaan lapangan kerja, pelatihan kejuruan, dan pembentukan sektor ekonomi baru. Untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, khususnya bagi lulusan baru, pemerintah telah mencoba menerapkan sejumlah inisiatif.

Namun, kesenjangan antara kesiapan tenaga kerja dan permintaan pasar membuat kebijakan ini masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan tenaga kerja Indonesia cukup besar, tantangan utamanya adalah menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi seluruh pekerja di negara ini sekaligus memastikan keterampilan yang mereka miliki sesuai dengan permintaan industri yang sedang berkembang. Pengembangan ekosistem yang dapat mendukung perluasan tenaga kerja terampil dan produktif memerlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta lembaga pendidikan.

Ketimpangan Keterampilan dan Pengangguran Terdidik

Kesenjangan keterampilan antara permintaan industri dan tenaga kerja merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia. Hampir 60% pekerja Indonesia terjebak dalam pekerjaan yang hanya membutuhkan ijazah sekolah menengah atas atau lebih rendah, yang berarti bahwa mayoritas pekerja masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Banyak bisnis Indonesia, khususnya yang bergerak di sektor manufaktur, jasa, dan teknologi, mengalami kesulitan menemukan personel yang berkualifikasi, menurut penelitian. Selain itu, pengangguran terdidik tetap ada meskipun pencapaian pendidikan lulusan perguruan tinggi meningkat. Menurut data BPS, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi diperkirakan mencapai 6% pada tahun 2023, melampaui angka pengangguran pekerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Di pasar tenaga kerja Indonesia yang semakin kompleks, terdapat dua isu penting, yaitu kesenjangan keterampilan dan pengangguran terdidik. Meskipun jumlah lulusan perguruan tinggi terus meningkat, banyak dari mereka yang kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka. Ketika orang dengan tingkat pendidikan lebih tinggi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai



dengan tingkat pendidikan dan keterampilan mereka, hal ini disebut sebagai pengangguran terdidik.

Kesenjangan antara pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan dan tuntutan pasar tenaga kerja merupakan salah satu penyebab utama kesenjangan keterampilan. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan oleh dunia industri, khususnya lulusan universitas. Sementara pasar tenaga kerja menuntut keterampilan teknis dan kemampuan praktis yang lebih terspesialisasi, pendidikan formal sering kali berfokus pada teori. Karena itu, para lulusan ini merasa sulit untuk memasuki pasar kerja meskipun memiliki gelar akademis karena mereka tidak siap untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan posisi saat ini. Kemajuan pesat dalam industri dan teknologi juga memperburuk masalah ini. Industri seperti manufaktur, digital, dan teknologi informasi berkembang pesat saat ini, tetapi banyak pekerja terdidik tidak memiliki keterampilan yang diperlukan.

Banyak pekerja yang terjebak dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka atau bahkan terpaksa bekerja di sektor informal, yang tidak menawarkan tunjangan kesejahteraan. Namun, kesenjangan antara jumlah lulusan dan posisi yang tersedia juga berdampak pada pengangguran terdidik. Perekonomian Indonesia masih berkembang, tetapi tidak ada cukup pekerjaan yang tersedia untuk mempekerjakan semua lulusan pendidikan tinggi, terutama di bidang yang membutuhkan keterampilan khusus. Lulusan yang lebih terdidik tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang mereka, dan sebagian besar posisi yang tersedia mungkin berada di sektor informal atau di bidang yang tidak memerlukan gelar sarjana. Fenomena ini juga dapat dilihat dari statistik pengangguran yang menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya berpendidikan dasar atau menengah. Karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan permintaan pasar, para lulusan perguruan tinggi ini justru lebih rentan terhadap pengangguran meskipun mereka memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah harus diambil, seperti meningkatkan standar pendidikan kejuruan untuk memastikan bahwa para lulusan memiliki keterampilan teknis yang dapat langsung diaplikasikan di tempat kerja.

Lulusan perguruan tinggi juga harus berpartisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk memastikan mereka dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan industri yang terus berubah. Untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan terdidik dan untuk mendorong investasi dalam industri yang sedang berkembang seperti ekonomi digital dan industri kreatif, sektor publik dan swasta harus bekerja sama. Jika mempertimbangkan semua hal, Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dari kesenjangan keterampilan dan pengangguran terdidik. Langkah-langkah penting untuk menurunkan pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi meliputi peningkatan jumlah kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja terdidik dan peningkatan kesesuaian antara pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja.

Kesenjangan Gender dalam Angkatan Kerja

Di pasar tenaga kerja Indonesia, kesenjangan gender masih menjadi masalah yang signifikan. Data Sakernas 2023 menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sekitar 50%, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi laki-laki sebesar 80%. Di daerah



pedesaan, di mana norma sosial dan hambatan terhadap pendidikan dan pelatihan lebih umum, masalah ini lebih terlihat. Kendala struktural seperti kesenjangan upah dan akses terbatas ke posisi manajerial atau pengambil keputusan terus menjadi kendala yang signifikan meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Meskipun ada kemajuan selama beberapa dekade terakhir, kesenjangan gender dalam angkatan kerja Indonesia masih menjadi masalah besar. Meskipun semakin banyak perempuan yang menempuh pendidikan dan memasuki dunia kerja, mereka masih menghadapi kendala yang membatasi kesetaraan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Kesenjangan gender ini tercermin dalam berbagai faktor, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan, dan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contoh paling mencolok dari kesenjangan ini adalah tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Secara umum, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia tetap lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun tingkat partisipasi mereka baru-baru ini meningkat, terutama di kota-kota besar dan di sektor-sektor tertentu seperti pendidikan dan kesehatan, peran tradisional perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh sering kali membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh di pasar tenaga kerja.

Perempuan, khususnya mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga, merasa lebih sulit untuk bersaing di pasar kerja sebagai akibat dari distribusi pekerjaan rumah tangga yang tidak merata ini. Perempuan juga lebih rentan terhadap pekerjaan informal dan sering terkonsentrasi di industri dengan upah yang lebih rendah. Perempuan lebih cenderung bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan sektor tidak terorganisir lainnya, yang sering kali menawarkan kesejahteraan dan jaminan sosial yang tidak memadai. Sebaliknya, industri yang lebih mapan dan stabil seperti manufaktur, konstruksi, dan teknologi biasanya didominasi oleh laki-laki. Hal ini berdampak pada potensi penghasilan dan kesejahteraan finansial perempuan selain jenis pekerjaan yang dapat mereka peroleh. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu masalah utama yang masih ada. Meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan semakin banyak pekerjaan formal, perempuan sering kali dibayar lebih rendah daripada laki-laki dengan kualifikasi yang setara. Kesenjangan upah ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk stereotip gender, diskriminasi di tempat kerja, dan terbatasnya akses perempuan terhadap peran manajerial atau pengambilan keputusan. Kesenjangan upah berdasarkan gender masih menjadi masalah yang sulit diatasi, bahkan di industri yang lebih maju. Selain itu, perempuan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk peran kepemimpinan dan promosi.

Meskipun jumlah perempuan yang menduduki jabatan eksekutif dan manajerial lebih banyak, persentase mereka dalam angkatan kerja masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Karena persepsi masyarakat bahwa laki-laki lebih mampu atau berdedikasi pada pekerjaan mereka dan perempuan lebih terbebani oleh kewajiban keluarga, banyak bisnis yang lebih mengutamakan laki-laki untuk jabatan strategis. Kesenjangan gender dalam pengaruh dan kekuasaan di tempat kerja diperparah oleh hal ini. Akses terhadap sumber daya dan peraturan yang mendukung keseimbangan kehidupan dan pekerjaan, seperti cuti hamil, pusat penitipan anak, atau jadwal kerja yang fleksibel, merupakan masalah lain yang harus dihadapi oleh perempuan dalam angkatan kerja. Kebijakan yang mengizinkan perempuan untuk bekerja dan membesarkan keluarga mereka secara bersamaan tidak sepenuhnya didukung oleh banyak bisnis.

Implikasi Demografi Angkatan Kerja terhadap Pembangunan Ekonomi



Pertumbuhan ekonomi sangat dibantu oleh tenaga kerja muda yang besar, tetapi efektivitasnya berkurang karena masalah kualitas dan keterampilan yang sesuai. Ketidakstabilan sosial dan peningkatan pengangguran dapat terjadi akibat manajemen yang buruk. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan standar pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta pengembangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tenaga kerja muda diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Implikasi demografi angkatan kerja terhadap pembangunan ekonomi Indonesia sangat besar, mengingat struktur usia penduduk yang relatif muda dan terus bertambah. Faktor-faktor seperti jumlah penduduk usia produktif, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan ketersediaan keterampilan yang relevan memegang peranan penting dalam memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kesejahteraan sosial.

1. Potensi Bonus Demografi

Saat ini, Indonesia tengah mengalami fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) melebihi proporsi penduduk usia nonproduktif (lansia dan anak-anak). Karena semakin banyak orang yang aktif bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian, situasi ini menawarkan potensi yang signifikan untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena semakin banyak orang yang berpenghasilan dan dapat mendukung konsumsi dalam negeri, bonus demografi berpotensi untuk meningkatkan output ekonomi dalam situasi yang tepat. Namun, untuk sepenuhnya mewujudkan potensi ini, negara harus memastikan bahwa tenaga kerjanya mampu berintegrasi ke dalam sektor ekonomi yang sedang berkembang dan memiliki keterampilan yang diperlukan.

2. Tantangan Pengangguran dan Kualitas Tenaga Kerja

Meskipun jumlah angkatan kerja terus bertambah, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja yang baik. Lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dengan baik belum mampu mengimbangi jumlah lulusan pendidikan yang besar, terutama dari perguruan tinggi. Bonus demografi dapat berakhir menjadi beban finansial alih-alih manfaat jika angka pengangguran terus meningkat, terutama di kalangan angkatan kerja yang lebih muda dan berpendidikan lebih baik. Namun, meskipun banyak orang yang memasuki dunia kerja, tidak semuanya memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan sektor ekonomi, sehingga kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri juga menjadi kendala.

3. Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jika tenaga kerja yang terus bertambah dapat bekerja di industri yang terus berkembang dan menjadi lebih efisien, hal itu dapat meningkatkan produktivitas nasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk meningkatkan standar pendidikan, pengembangan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja. Karena industri produktif seperti manufaktur, teknologi informasi, dan jasa akan berkembang pesat dengan bantuan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terlatih, peningkatan produktivitas ini akan secara langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sektor produktif tidak dapat tumbuh secara efisien jika tenaga kerja tidak memiliki pendidikan atau pelatihan, yang akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

4. Ketimpangan Ekonomi

Mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh distribusi tenaga kerja yang tidak merata menghadirkan kesulitan lain. Tenaga kerja yang sebagian besar bekerja di sektor upah



rendah dan informal dapat memperburuk kesenjangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Ketimpangan sosial dan ekonomi Indonesia dapat memburuk jika kebijakan yang menjamin kesempatan kerja yang sama dan pembangunan infrastruktur pendukung tidak dilaksanakan dengan baik.

5. Dampak pada Sistem Jaminan Sosial dan Infrastruktur

Indonesia harus memperhitungkan dampak pertumbuhan tenaga kerja yang signifikan terhadap infrastruktur dan sistem jaminan sosial. Jaminan sosial yang memadai, termasuk kesehatan, pensiun, dan asuransi ketenagakerjaan, diperlukan karena peningkatan jumlah tenaga kerja. Ketimpangan dalam kesejahteraan sosial akan meningkat jika sistem ini tidak diperkuat. Selain itu, untuk menangani peningkatan mobilitas tenaga kerja, akan ada kebutuhan yang lebih besar untuk infrastruktur pendukung, seperti perumahan, transportasi, dan fasilitas pendidikan.

6. Perubahan dalam Struktur Ekonomi

Besarnya demografi angkatan kerja dapat memengaruhi struktur perekonomian Indonesia. Misalnya, dengan semakin banyaknya tenaga kerja muda, permintaan terhadap sektor teknologi dan ekonomi digital akan meningkat, yang dapat mendorong transformasi perekonomian menuju ekonomi yang lebih berbasis teknologi dan pengetahuan. Namun, perubahan ini memerlukan adaptasi yang cepat, baik dari kebijakan pemerintah maupun sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya lapangan kerja di sektor-sektor baru.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja Dengan Kesempatan Kerja.

Tenaga kerja adalah segmen penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan, menganggur, atau siap bekerja kapan saja (biasanya mereka yang berusia 18 tahun ke atas). Salah satu tolok ukur pembangunan ekonomi adalah kesempatan kerja; namun, jika kesempatan kerja meningkat, pengangguran juga akan meningkat. Oleh karena itu, hal itu dapat dibuktikan dengan jumlah karyawan dan ketersediaan lapangan kerja sejak undang-undang kesempatan kerja diterbitkan. Karena menyediakan dasar bagi kehidupan sehari-hari, lapangan kerja sangat penting bagi masyarakat. Lapangan kerja biasanya langka, sehingga sulit untuk mendapatkannya. Hal ini tentu saja menyebabkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang berdampak pada pengangguran. Dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 45,84 juta orang yang terdiri dari 7,05 juta orang penganggur, 8,14 juta orang setengah menganggur, 28,41 juta orang pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta orang pekerja setengah menganggur atau PHK masih terbilang tinggi. Tenaga kerja baru tersebut mencapai 34,3% dari total tenaga kerja dan setiap tahunnya tercipta sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru. Dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang menganggur, maka diharapkan UU Nomor 11 Tahun 2020 ini mampu menyeimbangkan antara kesempatan kerja dengan kesempatan kerja. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi perekonomian apabila tidak diimbangi dengan kesempatan kerja atau perluasan kesempatan kerja. Meskipun saat ini jumlah tenaga kerja di Indonesia cukup banyak, namun untuk mendapatkan kesempatan kerja sangatlah sulit.

1. Kondisi ekonomi: Perekonomian suatu wilayah yang sedang berkembang pesat menunjukkan aktivitas produksi yang tinggi, yang menyebabkan banyak bisnis secara otomatis merekrut lebih



banyak karyawan. Persaingan pekerjaan di antara sesama pekerja pasti akan terpengaruh oleh hal ini.

2. Pertumbuhan populasi: Seiring dengan pertumbuhan populasi, semakin sedikit peluang kerja bagi setiap individu.
3. Kesempatan kerja yang tinggi didorong oleh sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas, begitu pula sebaliknya jika kualitasnya rendah akan menyulitkan dalam mencari kesempatan kerja.
4. Setiap orang akan sulit mendapatkan pekerjaan jika sumber daya manusianya rendah produktivitas dan kualitasnya, sebaliknya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang baik.
5. Tingkat upah: Kenaikan upah yang tidak sesuai dengan kapasitas produksi akan menyebabkan berkurangnya jumlah karyawan yang pada akhirnya akan mengurangi kesempatan kerja. Sementara bawahan sering mengabaikan tanggung jawab, karyawan terbiasa mendelegasikan semua tugas dan tanggung jawab kepada atasan.

Solusi Yang Harus Dilakukan Agar Seimbangnya Antara Angkatan Kerja Dengan Kesempatan Kerja (Analisis UU No. 11 Tahun 2020)

Saat ini, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan merupakan isu yang sering dihadapi oleh pemerintah. Memberikan kesempatan kerja kepada warga negaranya merupakan salah satu isu menantang yang sering dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia. Akibatnya, kemampuan pemerintah suatu negara untuk meningkatkan lapangan kerja atau menurunkan pengangguran sering digunakan untuk mengukur keberhasilannya. Masalah pengangguran di Indonesia rumit dan memiliki banyak sisi. Kurangnya lapangan kerja, pertumbuhan, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, ketimpangan ekonomi, dan relatif rendahnya kesempatan kerja dalam kaitannya dengan pertumbuhan tenaga kerja merupakan beberapa penyebab eksternal. Lebih jauh, kualitas sumber daya manusia dan aspek sosial budaya juga dipengaruhi oleh pengangguran. Masalah pengangguran juga erat kaitannya dengan kurangnya kemandirian atau sikap mental yang negatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, diperlukan solusi untuk menyeimbangkan jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta bersaing dengan negara lain yang menyediakan lapangan kerja. Sebab, ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan kesempatan kerja menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pengangguran dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

KESIMPULAN

Demografi tenaga kerja di Indonesia memiliki banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui bonus demografi yang akan terus berlanjut selama bertahun-tahun mendatang. Meskipun demikian, kesenjangan gender, pengangguran terdidik, dan ketidaksesuaian keterampilan terus menjadi masalah utama. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus memprioritaskan peningkatan standar pendidikan dan pelatihan kejuruan sekaligus memperkuat industri seperti teknologi, sektor kreatif, dan industri berbasis digital yang dapat mempekerjakan tenaga kerja terampil. Salah satu penyebab utama kesenjangan keterampilan adalah perbedaan antara pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan dan tuntutan pasar tenaga kerja. Banyak lulusan, terutama dari universitas, tidak memiliki keterampilan praktis yang



dibutuhkan industri. Pendidikan formal sering kali berfokus pada teori, meskipun pasar tenaga kerja membutuhkan keterampilan teknis dan kemampuan praktis yang lebih terspesialisasi. Karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup untuk memenuhi tuntutan pekerjaan modern, para lulusan ini kesulitan untuk memasuki dunia kerja bahkan dengan gelar akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran*. Vol. 7, no. 2.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Laporan Angkatan Kerja Nasional
- Hadi, R. (2021). Kesenjangan Keterampilan dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 18(2), 45-60.
- Heru Nugroho. (2001) . *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- N.P.N. Yanti dan Subidia. (2019). “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja. *Jurnal. Ekon. Pembang. Dan Bisnis Univ Udayana*, Vol. 8, No 1.
- Widodo, D., & Nugroho, H. (2019). Demografi Angkatan Kerja dan Perubahan Sosial di Indonesiam. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 22(3), 123-140.
- World Bank. (2022). *Indonesia’s Youth Employment and Skills Challenge*. Washington D.C.: World Bank Group.